

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Informasi keuangan suatu entitas baik entitas privat maupun publik selama kurun waktu tertentu dimuat pada laporan keuangan. Bagi entitas publik khususnya pemerintah, setiap entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan wajib untuk menyusun laporan keuangan. Hanya saja, laporan keuangan entitas akuntansi disajikan dalam rangka perannya sebagai pengguna anggaran, sedangkan entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyajian laporan keuangan ditujukan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan selama 1 (satu) periode akuntansi yang biasanya disajikan per semesteran dan/atau tahunan. Penyajian laporan keuangan yang dilakukan harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai aturan yang memuat prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan merupakan bukti konkret dari entitas pelaporan, salah satunya pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan pengguna laporan keuangan. Di dalam kerangka konseptual SAP, pengguna laporan keuangan yang dimaksud terdiri atas masyarakat; wakil rakyat; lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah. Masyarakat membutuhkan informasi untuk menilai kewajaran suatu pelayanan dan menilai kinerja pemerintah dalam mengelola pajak yang sudah dibayarkan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam rangka berinvestasi maupun melakukan pinjaman, investor maupun kreditor membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan pemerintah daerah untuk menerima investasi ataupun pinjaman. Terkait hal tersebut, investor dan kreditor akan menilai risiko investasi dan pinjaman serta menilai kondisi keuangan pemerintah yaitu likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat berkepentingan terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah termasuk pemerintah daerah dapat menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan manajemen.

Sebagai pihak internal yang menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan laporan keuangan untuk kepentingan manajemennya. Laporan keuangan yang berisi informasi keuangan dapat memberikan manfaat yang lebih kepada penggunaannya apabila dilakukan analisis yang lebih mendalam. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feedback value*) (Mahmudi, 2016:8). Entitas pelaporan dapat memanfaatkan analisis laporan keuangan tersebut untuk proses perencanaan dan pengendalian sumber daya yang berada dalam pengelolaan entitas.

Proses perencanaan keuangan memiliki keterkaitan dengan penganggaran keuangan daerah. Penganggaran merupakan proses untuk menganggarkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun periode akuntansi. Perencanaan keuangan yang dilakukan untuk satu tahun kedepan seharusnya dapat menjadikan laporan keuangan sebelumnya sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Agar dapat dijadikan sebuah acuan, laporan keuangan perlu dianalisis untuk dilihat bagaimana perkembangannya selama satu periode. Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat diukur rasio efektivitas dan rasio efisiensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Belanja untuk mengetahui apakah pendapatan serta belanja tahun sebelumnya sudah dilaksanakan dengan efektif dan/atau efisien. Dengan analisis pembiayaan dapat diketahui apakah pemerintah sudah memanfaatkan sisa lebih penggunaan anggaran dengan tepat. Dengan analisis yang sama dapat diketahui penyebab pemerintah memperoleh sisa lebih anggaran, keadaan surplus atau defisit serta penyebab dan dampak yang akan didapat. Hal-hal berikut akan diketahui jika laporan keuangan dianalisis lebih lanjut sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya.

Jika analisis terhadap laporan keuangan dilakukan setiap akhir bulan, triwulan, atau semesteran, hasil analisis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendalian keuangan periode waktu yang tersisa. Pengendalian keuangan daerah bertujuan untuk mengendalikan keuangan agar tetap berjalan dalam kondisi yang diharapkan. Jika dari analisis diperoleh hasil yang kurang baik maka hal tersebut dapat dijadikan *early warning system* bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan. Misalnya, pada periode berjalan dilakukan analisis varians pendapatan. Dari analisis tersebut diketahui bahwa terdapat selisih kurang yang signifikan antara realisasi dan anggaran. Hal itu dikarenakan pengelolaan pendapatan yang belum optimal. Adanya analisis tersebut dapat memberikan sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengatasi permasalahan tersebut sehingga anggaran pendapatan dapat terealisasi dengan efektif.

Meskipun analisis laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang baik untuk proses perencanaan dan pengendalian, namun dalam praktiknya masih sangat minim dilakukan. Bagaimana menyajikan laporan keuangan yang baik masih menjadi fokus bagi setiap entitas pelaporan. Menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada SAP agar memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ditekankan oleh entitas dari pada menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan manajemen internal. Penyajian sesuai standar sudah menjadi sebuah keharusan yang diikuti agar laporan keuangan yang disajikan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang menjadi pengguna laporan keuangan. Akan tetapi, entitas pelaporan juga harus menyadari bahwa laporan keuangan berperan penting dalam proses perencanaan dan pengendalian.

Keadaan ini juga turut didukung oleh belum adanya undang-undang yang secara langsung menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan analisis laporan keuangannya untuk kepentingan internal. PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP lebih menekankan bagaimana entitas baik akuntansi dan pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. PP No. 58 Tahun 2005 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Turunannya yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 merupakan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada PP No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan pada bagian penjelasan khususnya mengenai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) bahwa perlu dilakukannya perhitungan selisih realisasi dan anggaran serta disajikan dalam bentuk persentase berikut penjelasannya. Perhitungan tersebut terkategori sebagai analisis varians (selisih). Sehingga sejauh ini analisis yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas pada analisis varians yang menganalisis laporan realisasi saja.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan, Pemerintah Kota Palembang telah berhasil meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut sejak tahun 2010. Untuk itu, Walikota Palembang, Bapak Harnojoyo menerima penyerahan penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diwakilkan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Taukhid, serta didampingi oleh Kepala KPPN Palembang, Ibu Siti Rosidah Sundari atas keberhasilannya dalam mencapai opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017. Pada saat penyerahan tersebut, Walikota Palembang menyatakan untuk terus berkomitmen dalam mempertahankan opini WTP di masa yang akan datang sebagai suatu tradisi (www.djpb.kemenkeu.go.id).

Keberhasilan yang sudah diraih tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang sangat fokus untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan serta prinsip yang berlaku pada Standar Akuntansi Pemerintah. Kefokusan yang dijalankan secara konsisten juga memberikan hasil yang memuaskan bagi Pemerintah Kota Palembang dengan menerima opini WTP selama 8 tahun berturut-turut. Prestasi yang telah diukir memang sangat penting untuk dijaga, dalam hal ini Palembang sudah sangat baik menjaganya. Akan tetapi, sebuah prestasi dapat menjadi lebih bermanfaat apabila dapat memberikan *outcome* yang lebih besar ketimbang hanya memberikan *output*. *Outcome* yang dimaksud adalah

laporan keuangan yang dihasilkan pada tahun sebelumnya dapat dianalisis lebih dalam sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Analisis Laporan Keuangan pada Proses Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Daerah (Studi pada BPKAD Kota Palembang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah BPKAD Kota Palembang melaksanakan analisis laporan keuangan?
2. Bagaimana pemanfaatan analisis laporan keuangan dalam proses perencanaan keuangan daerah?
3. Bagaimana pemanfaatan analisis laporan keuangan dalam proses pengendalian keuangan daerah?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan dibatasi hanya pada pemanfaatan analisis laporan keuangan pada proses perencanaan dan pengendalian keuangan daerah di BPKAD Kota Palembang. Studi dilakukan hanya di BPKAD karena berkaitan dengan perannya sebagai PPKD yang berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 memiliki tugas untuk menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka serta menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis laporan keuangan oleh BPKAD Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan analisis laporan keuangan dalam proses perencanaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan analisis laporan keuangan dalam proses pengendalian keuangan daerah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemanfaatan analisis laporan keuangan pada proses perencanaan dan pengendalian keuangan daerah.

2. Bagi Lembaga

Dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penulis berikutnya untuk melanjutkan penelitian dan melengkapi penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang sama.

3. Bagi Institusi

Dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam rangka pemanfaatan laporan keuangan pada proses perencanaan dan pengendalian keuangan daerah.